



Badung Relakan Asetnya Diambilalih Pusat dan Provinsi

MANGUPURA, NusaBali

Pemkab Badung harus merelakan pengelolaan Terminal Mengwi diambilalih oleh pemerintah pusat, dan SMA/SMK dikelola oleh Pemprov Bali. Pengambilalihan pengelolaan itu termasuk tanah, bangunan, dan personel, yang total nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

Berdasarkan data yang dihimpun, Selasa (30/6), aset-aset di Terminal Mengwi seperti tanah hampir semuanya adalah aset pemerintah daerah, sedangkan untuk bangunan sebagian milik pemerintah daerah, karena di sana juga ada bantuan pemerintah pusat. Bila ditotal nilainya hampir menembus Rp 100 miliar lebih. Belum lagi personel terminal berjumlah 153 orang, terdiri dari PNS 52 orang dan tenaga kontrak 101 orang.

Kemudian untuk SMA/SMK. Di Badung ada 8 SMA negeri, 19 SMA swasta, dan 2 SMK negeri, 11 SMK swasta.

Penyerahan seluruh aset ini dipertegas oleh Sekkab Badung Kompyang R Swandika. Menurut

dia, hasil konsultasi ke pusat, pemerintah daerah/kabupaten harus menyerahkan atau mengalihkan kepemilikan personel, peralatan, pembiayaan, dan dokumen (P3D) sepenuhnya kepada pengelola. Di mana dalam hal ini P3D Terminal Mengwi diserahkan kepada pemerintah pusat, sedangkan untuk SMA/SMK kepada Pemrov Bali.

"Tidak ada pilihan kita harus serahkan, baik itu sertifikat aset tanah dan gedung. Itu perintah undang-undang, wajib hukumnya kita laksanakan," jelas pejabat asal Kerobokan, Kuta Utara, itu.

Masih menurut Swandika, pengambilalihan pengelolaan sudah ditetapkan pula deadlinenya. Untuk penarikan pengelolaan Terminal Mengwi efektif berlaku mulai 1 Januari 2016. Sedangkan SMA/SMK yang pengelolaannya akan diambilalih pemprov pada Oktober 2016. Karena Terminal Mengwi diambil pada awal tahun, maka dalam APBD 2016 tidak diberikan anggaran lagi. Tapi berbeda halnya dengan SMA/SMK yang pengelolaannya oleh Pemp-

rov Bali pada Oktober 2016, sebab atas hasil konsultasi, tetap akan diberikan anggaran hingga Desember 2016.

Secara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Badung I Wayan Weda Darmaja, menegaskan, pendataan aset untuk Terminal Mengwi sudah rampung dikerjakan. "Semuanya telah kami hitung, aset tanah, bangunan, termasuk personelnnya," kata Weda.

Dari penghitungan aset yang dilakukan, luas tanah 11 hektare dengan nilai pembebasan Rp 9 miliar lebih pada tahun 1997-2000. Penataan lahan dan pondasi bangunan pada APBD 2011 sebesar Rp 5 miliar lebih. Kemudian pembangunan sampai tuntas pada tahun 2009 dengan dana APBD sebesar Rp 73 miliar. Untuk peralatan nilainya Rp 800 juta. "Belum lagi personel terminal berjumlah 153 orang, karena selama ini tenaga kontrak digaji oleh pemerintah daerah," tutur pejabat asal Sembung, Mengwi, ini. **as**



Disdikpora Siapkan Alat Permainan Edukatif Senilai Rp 2 Miliar

MANGUPURA, NusaBali

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung menggelontorkan anggaran lebih dari Rp 2 miliar untuk membantu sarana pendidikan tingkat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Saat ini rencana pemberian bantuan masih dalam proses tender.

Dalam laman website LPSE dialamat <http://lpse.badungkab.go.id>, lelang proyek bernama Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD, Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga. Nilai pagu paket sebesar Rp 2,2 miliar dan untuk harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar 2,1 miliar.

Berdasarkan dokumen lelang, terhitung sejak kemarin tender proyek memasuki tahap penawaran. Proses selanjutnya evaluasi penawaran, termasuk evaluasi dokumen kualifikasi sampai berita acara hasil pelelangan akan berjalan selama sepekan ke depan. Nanti terhitung 7 Juli 2015 secara resmi baru akan diketahui siapa rekanan yang keluar sebagai pemenang lelang. Dan sepekan kemudian atau tepatnya pada 14 Juli, bila tidak ada perubahan tahapan maka dengan pemenang tender akan dilakukan penandatanganan kontrak.

Kepala Disdikpora I Ketut Widia Astika, saat dikonfirmasi membenarkan rencana pemberian bantuan tersebut. Menurut dia program ini sudah menjadi program rutin walaupun memang tidak setiap tahun. "Iya sarana bermain edukatif akan diberikan kepada seluruh PAUD yang ada di Badung," katanya.

Menurut Astika, pemberian bantuan sarana ini untuk meningkatkan sarana bermain anak-anak. Walaupun demikian ia mengaku tak hafal berapa PAUD yang nanti akan menerima bantuan dari pemerintah daerah ini. **as**

Edisi : Rabu, 1 Juli 2015

Hal : 2



Dispenda Diminta Pikirkan Sumber PAD

Selain Samsat



• IST
GUBERNUR Made Mangku Pastika (kanan) saat sidak di kantor Dispenda Bali, Selasa (30/6).

DENPASAR, NusaBali

Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Bali untuk serius meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), di luar pajak samsat.

Hal itu dikemukakan Pastika di depan seluruh pegawai beserta pejabat di lingkungan Dispenda Provinsi Bali saat melaksanakan sidak ke SKPD, Selasa (30/6). Menurut Pastika, Dispenda bukan hanya menangani urusan samsat melainkan juga fokus mencari pendapatan-pendapatan lainnya yang diharapkan mampu mendorong pendapatan Provinsi Bali.

"Pendapatan itu bukan cuma samsat, tolong dipikirkan juga pendapatan yang lainnya," tegas Pastika, seperti siaran pers yang diterima *NusaBali*.

Ia meminta para pejabat eselon di Dispenda Bali untuk turut serta berpikir dan mencari pendapatan yang lainnya. Untuk itu Pastika menyarankan untuk berkoordinasi dengan Biro Aset untuk

dapat mengelola aset yang dimiliki oleh Provinsi Bali dalam rangka mencari pendapatan yang baru. "Aset kita juga banyak sekali, saya minta juga kerja sama dengan aset sekaligus mengecek aset tersebut. Tanah-tanah kita itu hampir tidak menghasilkan duit, seolah-olah bukan milik kita, padahal itu milik kita dan mampu menghasilkan duit jika dikelola dengan baik," tandas Pastika.

Selain itu Pastika juga menginginkan para pegawai samsat diberikan target yang harus dicapai dalam waktu tertentu, sehingga mampu mencakup seluruh objek pajak yang ada di Bali dan tidak terjadi penunggakan pajak kendaraan bermotor. "Seperti pegawai bank itu, si A harus mampu mencapai target tertentu dan harus dapat dalam sebulan, misalnya. Kalau *gak* bisa, keluar dari Dispenda. Apa boleh buat itu kontraknya, dibuat begitu dan harus seperti itu solusinya, nanti kita ganti dengan pegawai yang lebih mampu," tegas Pastika.

Edisi : Rabu, 1 Juli 2015

Hal : 2



DPRD Apresiasi WTP Gianyar 2015



• NUSABALI/NATA

Bupati Gianyar AA Gde Agung Bharata menyalami anggota DPRD usai Rapat Paripurna II, Selasa (30/6), di Ruang Sidang DPRD Gianyar.

GIANYAR, NusaBali

Seluruhnya atau lima fraksi di DPRD Gianyar menyampaikan Pandangan Umum terhadap Pengantar Bupati tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014 dalam Rapat Paripurna II, Selasa (30/6), di Ruang Sidang DPRD Gianyar. Lima fraksi yakni Fraksi PDIP, Golkar, Partai Demokrat, Gerindra dan Hanura - Nasdem, mengapresiasi atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali untuk Pemkab Gianyar. Apresiasi itu karena dalam pengelolaan keuangan daerah 2014 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selain itu, apresiasi juga karena Gianyar menjadi kabupaten terbaik dalam ajang Indonesia's Attractiveness Award 2015 dari majalah Tempo, sekaligus Bupati Gianyar AA Gde Agung Bharata termasuk 3 besar nominator Anugerah Seputar Indonesia kategori Pemerintahan Berprestasi.

Secara umum fraksi-fraksi menyampaikan perlunya peningkatan kinerja di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik. DPRD memuji beberapa hal, antara lain, peningkatan Pendapatan Daerah Gianyar.

Hal lain yang jadi perhatian lima fraksi, antara lain, terkait nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun anggaran 2014 sebesar Rp 239.737.666.547,32. Pandangan Umum Fraksi PDIP dibacakan I Nyoman Amerthayasa, mengusulkan pengangkatan guru-guru tidak tetap. Karena para guru ini sudah mengabdikan bertahun-tahun. Pandangan Fraksi Golkar yang dibacakan Ngakan Ketut Putra menyampaikan, penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) serta pelayanan terhadap masyarakat belum memuaskan.

Pandangan Fraksi Partai Demokrat dibacakan AA Gede Bawa Hartawan menekankan pentingnya memperhatikan soal etika, tata

krama, prosedur dan mekanisme didalam menjalankan tugas bagi pejabat. Pandangan Fraksi Gerindra dibacakan I Gusti Ngurah Agus Supriadi menyampaikan masalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pihaknya juga menanyakan kekosongan dua jabatan Direktur PDAM. Lanjut, pandangan Fraksi Hanura Nasdem dibacakan I Nyoman Artawa Putra menanyakan masalah kemacetan lalulintas di Ubud.

Wakil Ketua DPRD Made Togog mengatakan, Penyampaian Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi ini akan dilaksanakan pada Rapat Paripurna III, Jumat (3/7).

Sekcab Gianyar Ida Bagus Gaga Adi Saputra dihubungi terpisah terkait pandangan umum Fraksi di DPRD menyampaikan terkait dengan SILPA, semata-mata sebagai upaya efisiensi penggunaan anggaran dan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Masalah PDAM saat ini sudah dibentuk tim seleksi Direksi PDAM dengan melibatkan unsur akademisi untuk peningkatan pelayanan air bersih di Gianyar.

Kebijakan pengangkatan PNS, kata dia, kewenangan pemerintah pusat. Namun Pemkab Gianyar tetap mengajukan usulan untuk mengisi kekosongan tenaga guru dan kesehatan. Terkait etika pegawai, akan dievaluasi sesuai mekanisme. Masalah kemacetan di Ubud, Pemkab Gianyar telah bekerja sama dengan ITB Bandung untuk merancang rekayasa lalulintas.

Rapat Paripurna II dibuka Wakil Ketua DPRD I Made Togog, dihadiri Bupati Gianyar AA Gde Agung Bharata, Wabup Made Mahayatra, Muspida, pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Gianyar, camat dan unsur terkait lainnya. @ Isa

Edisi : Rabu, 1 Juli 2015

Hal : 6



Sidang Dugaan Korupsi Raskin Gianyar Hakim Sebut Lebih Rumit dari Kasus Century



TERDAKWA dugaan korupsi beras raskin, AA Bagus Semaraputra (kiri) saat dengan mendengarkan keterangan saksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (30/6).

DENPASAR, NusaBali

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar dibuat pusing tujuh keliling dengan perkara dugaan korupsi beras miskin (raskin) dengan terdakwa Kaur Kesra Desa Malinggih, Payangan, Gianyar, Anak Agung Bagus Semaraputra, 48. Bagaimana tidak, enam saksi yang dihadirkan hampir semuanya memberikan keterangan plin-plan hingga membuat majelis hakim meradang dan menyebut kasus ini lebih rumit dari kasus Bank Century.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (30/6), JPU Herdian Rahardi dkk menghadirkan enam saksi. Di antaranya Drs Made Oka dan Adityo (Bulog) serta empat warga penerima raskin, yaitu I Wayan Kasbila, I Wayan Antara, Ni Nyoman Maryani dan Ni Nyoman Miasih.

Made Oka dan Adityo dari Bulog yang diperiksa pertama langsung membuat majelis hakim harus memutar otak. Pasalnya, beberapa pertanyaan majelis hakim

dijawab dengan berubah-ubah. Salah satunya saat saksi ditanya soal keterlambatan pengiriman beras pada 2013. Saat itu, Oka yang menjabat sebagai korlap pem-

bagian beras di Bulog mengaku tidak pernah ada keterlambatan.

"Paling lama mungkin 2 bulan saja," jelasnya. Namun ketika dikonfirmasi dengan terdakwa,

ternyata pada awal 2013 tepatnya Januari hingga April terjadi keterlambatan. "Beras untuk Januari, Februari dan Maret baru dikirimkan bulan April," jelas terdakwa

yang ditanya soal keterlambatan. Oka yang balik ditanya majelis hakim sempat membantah hingga akhirnya mengaku setelah didesak majelis hakim. "Iya. Memang waktu itu telat sampai empat bulan," ujar Oka polos yang langsung disambut kemarahan hakim.

Selanjutnya, giliran empat warga penerima raskin yang membuat hakim meradang. Awalnya, keempat saksi ini mengatakan rutin menerima beras setiap bulannya. Saat ditanya soal beras raskin ke 13, 14 dan 15, keempat saksi mengaku tidak tahu. "Setiap bulan kami hanya terima satu karung beras. Tidak pernah lebih," jelasnya. Namun saat dicek data pengambilan beras, ternyata memang pernah menerima raskin sebulan dua kali yang diakui terdakwa sebagai beras raskin ke 13, 14 dan 15. "Nah. Ini ada terima beras dua kali sebulan. Kalau seperti ini, kasus ini lama-lama lebih rumit dari kasus Century," kelakar hakim sambil menggeleng-gelengkan kepala. **rez**

Edisi : Rabu, 1 Juli 2015

Hal : 5